



Kucuran Dana

Muncul Cerita

Bernilai Miliaran, Cairnya Bertahap

DENPASAR - Meski kasusnya di Polda Bali terkesan masih tarik ulur terkait kejelasan statusnya sebagai tersangka, namun penelusuran *Jawa Pos Radar Bali* menunjukkan adanya dugaan aliran dana kepada Ketua DPRD Badung, Ketut Parwata. Dari keterangan sumber pejabat Badung, juga dari sumber pihak kondotel dan sumber pihak polisi, menyebut adanya dugaan kucuran dana miliaran rupiah ■

► Baca **Muncul...** Hal 31



Dugaan Kucuran Miliaran dari Kondotel Avani

- **Nama Kondotel** : Avani Hotel & Resort
- **Jumlah Kamar** : 590 kamar
- **Lokasi** : Di Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran
- **Pengajuan Izin** : Sejak 2013. Tapi hanya sebatas mendapat izin prinsip saja. Izin mendirikan bangunan (IMB) belum punya
- **Penyebab Dugaan Suap** : Karena sulit mendapatkan izin akhirnya melakukan upaya suap agar lancar izinnya. Uang suap dikirim empat tahap, sejak tahun 2014. Jumlah mencapai Rp 3,3 miliar
- **Kasus Mencuat** : Kasus dugaan mencuat lagi November 2016 karena ada laporan ke Polda

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : _____

Hal : _____



Parwata : Semua Itu Tidak Benar

■ MUNCUL...

Sambungan dari hal 21

Ini khusus untuk meloloskan perizinan. Masing-masing sumber kepada koran ini meminta dirahasiakan identitasnya.

Sumber koran ini menyebut nama kondotel tersebut adalah Avani Hotel & Resort. Lokasinya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Jimbaran, Kelurahan Jimbaran (bukan di Mumbul seperti berita sebelumnya).

Kenapa pusing soal izin? "Kondotel berjumlah 590 kamar ini kesulitan mendapatkan izin dari Pemkab Badung sejak awal pembangunan 2013," papar sumber tersebut.

Dijelaskan, pemberian uang dilakukan bertahap sejak 2014 lalu, secara bertahap. Saat itu Putu Parwata masih jadi anggota dewan, belum menjabat ketua.

Meski masih jadi anggota dewan, Parwata dikenal memiliki kedekatan dengan banyak pemilik hotel. Ini karena dia juga bergerak dalam bisnis serupa.

Merasa percaya dengan Par-

wata, pihak kondotel melalui direktur perusahaan berinisial CR bertemu dengan Parwata untuk membicarakan pengurusan perizinan. Pembahasan awal perusahaan berencana mencari izin prinsip kondotel. Melalui CR perusahaan mulai mengucurkan uang secara bertahap kepada Parwata. Awalnya Parwata sempat minta Rp 1 miliar. Namun, izin yang diminta tak kunjung keluar. "Penyerahan uangnya lebih dari empat kali. Parwata sendiri pernah datang ke kantor kondotel," imbuh sumber ini.

Selanjutnya perusahaan kembali mengeluarkan uang beberapa kali hingga total Rp 3,3 miliar. "Uang Rp 3,3 miliar itu untuk mengurus izin prinsip kondotel," jelas sumber koran ini yang meminta namanya dirahasiakan. Menurut sumber, Parwata menyatakan kesiapannya membantu. Saat itu Parwata menjanjikan akan membantu mencarikan izin prinsip yang diperlukan, dengan syarat harus disediakan sejumlah uang.

Dua tahun berselang, izin prinsip yang dijanjikan Parwata keluar. Sampai saat ini kondotel baru sebatas memiliki izin prinsip saja. Sementara izin mendirikan bangunan (IMB) belum punya.

Namun masalah muncul pada akhir 2016 lalu setelah ada laporan ke Ditreskrimsus Polda Bali, cerita berubah. Sejumlah petinggi perusahaan kondotel diperiksa. Tak terkecuali direktornya juga.

Dalam pemeriksaan pihak perusahaan mengakui adanya aliran dana hingga Rp 3,3 miliar kepada Parwata untuk pengurusan izin prinsip tersebut. "CR sendiri saat ini sudah dijebloskan ke Lapas Kerobokan karena terlibat kasus cek kosong," papar sumber koran ini.

Nah, uang Rp 3,3 miliar yang diserahkan CR kepada Parwata inilah dipermasalahkan. Informasinya, Parwata bisa dikenakan sejumlah delik pidana. Mulai dari menerima suap atau gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. "Sekarang tinggal keberanian penyidik

Edisi : Jumat, 3 Feb 2017

Hal : 21



Radar Bali

mengusut. Karena semua bukti pemberian uang dan lainnya sudah diserahkan ke penyidik," tukas sumber koran ini.

Dari pihak penyidik sendiri kemarin terkesan menghindari saat ditanya tentang perkembangan. "Langsung saja sama Pak Dir (Dirreskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Kenedy). Biar kita jangan salah," beber anggota penyidik Reserse Kriminal Khusus kemarin.

Hanya ada sedikit keterangan. Yakni adanya pengakuan sudah memeriksa belasan saksi termasuk pihak kondotel. "Agenda pemeriksaan lanjutan terhadap Parwata pasti ada. Tapi kami belum jadwalkan. Masih dalam keterangan pihak kondotel," kata sumber ini dari pihak penyidik.

Berdasarkan informasi yang didapat, lanjutnya, ternyata Polda Bali bukan mendapatkan surat kaleng. Melainkan ada pengaduan via telepon. "Infonya via telepon. Biar lebih jelas coba konfirmasi ke Pak Dir saja biar jangan salah," turnya sembari mengelak pertanyaan

wartawan terkait penetapan tersangka bagi Parwata. "Wah kalau itu saya tidak berani omong," paparnya.

Parwata Membantah Keras SAAT dikonfirmasi pada Selasa malam lalu (31/1), Parwata membantah keras semua tuduhan dari pihak kondotel Avani Hotel & Resort itu. Dengan tegas dia menyatakan bahwa semua yang ditujukan kepadanya itu tidak benar.

"Saya tidak ada menangani izin. Saya tidak menangani izin kondotel itu. Dan saya tidak ada menerima uang," jawab Parwata saat dikonfirmasi via telepon.

Ketua DPRD Badung ini menuding, semua data yang disodorkan itu adalah palsu. Mulai dari namanya palsu, tanda tangannya juga palsu.

"Jadi itu semua data palsu, kuitansi palsu, nama saya palsu, tanda tangan saya palsu dan itu dulu sempat dimasukkan surat

kaleng. Itulah saya mengklarifikasi ke polda, alat bukti yang tidak otentik," tegas politisi asal Dalung, Badung, ini.

Disinggung disebut-sebut menerima uang miliaran rupiah, lagi-lagi dia juga membantahnya. Dia menyatakan tidak ada menerima uang pengurusan izin kondotel tersebut. "Menerima dana itu tidak benar. Semua ditujukan kepada saya itu tidak benar," tandasnya. (tim radar bali)

Edisi :

:

Hal :

: 21